



Contents lists available Online

Jurnal Suluah Komunitas

Journal homepage: <http://sulben.ppi.unp.ac.id/index.php/suluah>



Mewujudkan nagari maju melalui penerapan *good governance* dalam pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi dan hukum islam

Hengki Januardi¹, Wisnatul Izzati², Yulia Ningsih^{*)3}, Rio Rahmat Yusran⁴

¹ Hukum/Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi/Indonesia

² Ners/Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi/Indonesia

³ Administrasi Publik/Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi/Indonesia

⁴ Akuntansi/Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi/Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 8th, 2022

Revised Aug 5th, 2022

Accepted Sept 6th, 2022

Keyword:

Good governance

Public service

Health

Economy

Law

ABSTRACT

Good governance is a value and benchmark in carrying out a good, orderly, and systematic system of government. In the current era, the central, regional and rural command system which is part of the government system requires one-door public services, integrated with one another in order to realize and achieve government goals. Public services based on health, economics, and law are the objectives of the Indonesian government which are carried out and implemented by the current president. In order to achieve this goal, one of the ways to create an advanced Nagari is that represents public service in terms of the health system, economic system, and legal system that is implemented in the government, especially for remote areas (Nagari). Pesisir Selatan Regency, Nagari Lumpo is part of the government system in providing public services to the surrounding community. The impact of this public service is reflected in the welfare of the community and the achievement of the level of public education (graduate) that has been carried out by the regional government in realizing an advanced Nagari.



© 2022 The Authors. Published by Universitas Negeri Padang.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ningsih, Y.,

yulianingsih2024@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintah nagari di wilayah Sumatera Barat dalam pengelolaan sistem pemerintahan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua undang-undang ini menjadi dasar dalam aspek legalitas kembali dibentuknya pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang sebelumnya berbentuk pemerintahan desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Nagari merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang dihormati oleh negara selama sesuai dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya. Dengan demikian pemerintahan nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Prinsip penyelenggaraan Pemerintah nagari memiliki otonomi yang berdasarkan asal usul dan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat Sumatera Barat. Pemerintah Nagari dapat menjalankan kewenangan yang oleh peraturan perundangan belum dilaksanakan oleh pemerintah, disamping itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten, Pemerintah Nagari dapat menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dengan sarana dan prasarana pendukung serta Sumber Daya Manusia (Assyahri & Vaguita, 2019; Putera et al., 2022)

Nagari lumpo Menurut sejarah yang didapat dari tutur para tetua nagari, penduduk Nagari Balai Sinayan Lumpo berasal dari Bayang yang masyarakatnya hidup dari bertani. Sejalan dengan perkembangan penduduk yang semakin banyak, tuntutan akan kebutuhan lahan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada awal Abad ke-18, mereka berusaha mencari lahan baru dengan melewati perbukitan yang merupakan jajaran bukit barisan, di akhir perjalanan mereka melihat sebuah ranah yang sangat luas dan subur yang selama ini terlupakan atau bahasa minangnya Lupo. Seiring dengan perkembangan waktu dan morfologi, kata Lupo berubah menjadi Lumpo dan sampai sekarang masyarakat menyebut daerah ini dengan sebutan Lumpo.

Nagari Balai Sinayan pada awalnya merupakan salah satu kampung dari 12 kampung yang terdapat di Kenagarian Lumpo. Nama Balai Sinayan diambil dari sejarah kampung, dimana dulu terdapat tempat pertemuan niniak moyang dalam bahasa minang disebut Balai yang hanya diadakan pada hari senin atau bahasa minangnya sinayan, sehingga masyarakat menyebut daerah tersebut Balai Sinayan. Seiring dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran Nagari, maka sistem pemerintahan Kampung berubah menjadi sistem pemerintahan Nagari yaitu Nagari Balai Sinayan pada tahun 2011.

Suatu sistem pemerintahan, nagari merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu nagari yang memiliki budaya, adat istiadat dan aturan aturan yang berlaku akan mencerminkan suatu kualitas daerah tersebut yang merupakan tongkat, kekuatan suatu bangsa. Nagari yang maju tercemin dari tata kelola, aturan dan peraturan yang berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dan kualitas penduduknya. Hal ini akan berdampak positif terhadap nama baik suatu bangsa. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, keberagaman adat, suku dan bahasa merupakan cerminan suatu negara yang masyarakat heterogen.

Mewujudkan dan menjaga nama baik suatu bangsa maupun nama baik nagari Indonesia di butuhkan suatu tata kelola pelayanan publik yang baik dan benar dari tingkat kesadaran masyarakat dan aparatur- aparatur nagari atau pemerintah. Agar tercapai tujuan pemerintah dan majunya suatu nagari tersebut, maka dibutuhkan pelayanan publik berbasis Kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat sangatlah penting terutama Kesehatan. Kesehatan merupakan awal mula merintis dan terlaksananya kegiatan - kegiatan masyarakat dan tujuan masyarakat itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam good governance berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual good governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. Good governance juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Assyahri & Frinaldi, 2021; Warjiyati, 2018).

Penerapan good governance telah memfokuskan pada pelayanan berbasis kesehatan, namun belum banyak dilakukan oleh pihak terkait salah satunya tentang pelayanan pada Pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan hasilnya bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana (Angkat, Abdul, & Isnaini, 2017; Assyahri, Lanin, & Saputra, 2021), Penelitian terdahulu tentang Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja E-Government hasilnya bahwa Pelayanan publik saat ini dapat dikatakan belum merata, hanya orang-orang tertentu yang mendapat akses mudah dalam mendapatkan informasi (Witanti & Abdillah, 2018). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu cukup maksimal seperti : prinsip transparansi pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu diterapkan cukup maksimal telah tersedianya papan informasi yang jelas mengenai tata cara mengases pelayanan, hanya saja masih berupa papan informasi yang ada di Puskesmas belum berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara meluas (Triyanto, Purnawan, & Saputra, 2021). Berdasarkan hal di atas,

pelayanan publik masih terdapat masalah dan kurang merata, terkhususnya pada sarana seperti sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi.

Penerapan Good governance ditinjau dari segi hukum Islam mengalami persolan yang terjadi dalam tata kelola pemerintah, oleh karena itu kita dituntut untuk mengkaji realitas kondisi pemerintahan saat ini agar lebih baik, profesional, bertanggungjawab, amanah, salah satunya dengan cara membangun konsep good governance dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti nilai kesetaraan, tasamuh (toleransi), keadilan (justice), kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran (honesty), objektif (comprehensiveness) dan ini menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance) (Warjiyati, 2018).

Selanjutnya Masyarakat sehat akan memberikan dampak positif terhadap perokonomi mereka sendiri, keluarga, nagari dengan terlaksananya kegiatan sehari hari masyarakat tersebut. Untuk terlaksanakan kegiatan masyarakat yang terus menurut dan berkembang dibutuhkan aturan aturan yang mengikat satu dengan yang lain secara hukum agar terjalannya harmonisasidalam masyarakat tersebut. Dampak dari terlaksananya kesadaran akan Kesehatan, akan menumbuhkan perekonomian masyarakat dan munculnya aturan aturan hukum yang mengatur hubungan harmonisasi masyarakat dalam pelayanan masyarakat tersebut. Pelayanan berbasis Kesehatan, ekonomi dan hukum akan terwujudnya suatu nagari yang maju dan akan memiliki tata kelola yang baik bagi nagari tersebut. Salah satu cara mengetahui dan mewujudkan nagari yang maju dalam pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi, hukum dapat terwujud dengan salah satu cara yang di lakukan para akademisi dalam berbagi ilmu, pemahaman, share knowledge akan basis Kesehatan, ekonomi dan hukum yang mereka (para akademisi) berikan kepada masyarakat, perangkat nagari untuk tercapainya nagari maju.

Penerapan sistim berbasis pelayanan di aparatur pemerintahan Nagari Lumpo sudah mulai dijalankan dan terstrukturisasi, sebagai bukti dengan adanya tupoksi masing masing anggota Nagari. Nagari lumpo juga mengekspos semua kegiatan yang ada dilingkungan sekitar di media sosial dan didokumentasikan dalam dokumen laporan nagari, dipajang di kantor Nagari, dengan begitu masyarakat jadi tahu apa yang sudah dilakukan Pemerintah Nagari (Pemnag) dan kemana saja dana desa direalisasikan untuk pembangunan Nagari. Dalam melaksanakan kegiatan, Pemerintah Nagari melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena ini bentuk komitmen Nagari dalam kelangsungan pembangunan. Namun dalam sistim kerja tersebut, basis akan kesehatan sangat minim informasinya dan akan pengetahuan ilmu hukum juga sangat minim, sehingga tidak memungkinkan akan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat nagari lumpo tersebut.

Dari Analisis situasi diatas dapat dikelompokkan permasalahan yang dialami oleh Nagari lumpo, kabupaten pesisir selatan terkait dengan layanan terutama layanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam mengakses informasi secara luas (berbasis elektrik), belum tersedianya layanan pengaduan online, tidak tersedianya kotak saran serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengembangan akan ilmu Kesehatan, Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi rakyat dan menggali nilai-nilai pelayanan publik sehingga Keberadaan hukum Islama adalah penyelesaian atau sedikitnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah berbangsa dan bernegara. Hukum Islam mempunyai realitas sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Melalui peninjauan hukum Islam, dapat digali norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan hakikat dan prinsip good governance.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis memandang perlu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat nagari beserta aparatur pemerintahan Nagari Lumpo Kabupaten Pesisir selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat nagari dan aparatur pemerintahan nagari diberikan pemahaman untuk memajukan nagarinya melalui penerapan good governance dalam pelayanan pelayanan public, ekonomi, kesehatan dan hukum Islam

Metode

Kegiatan pengabmas yang dilakukan pada bulan oktober 2022 ini dilakukan di Kantor Nagari Lumpo, Kabupaten Pesisir Selatan. Peserta kegiatan di ikuti oleh masyarakat nagari dan aparatur pemerintahan nagari. Dengan alur kegiatan dilaksanakan dengan metode focus group discussion (FGD) yang diawali dengan pemaparan materi dari tim pengabmas tentang mewujudkan nagari maju melalui penerapan good governance dalam pelayanan berbasis kesehatan, ekonomi dan Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui tahap:

Metode Ceramah

Materi di sampaikan oleh beberapa orang pemateri yaitu Yulia Ningsih, S.Ap., MM terkait dengan pelayanan publik, Hengki Januard, M.H terkait dengan materi tinjauan hukum islam dalam penerapan good governance, Wisnatul Izzati, M,Kes materi terkait dengan Pelayanan berbasis Kesehatan dan Rio Rahmat Yusran, M.Si materi tentang pelayanan public dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Memberikan Informasi atau pengetahuan tentang memajukan nagari melalui penerapan good governance dalam memberikan pelayanan berbasis kesehatan, ekonomi dan hukum

Metode Diskusi

Tim pengabmas memberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi kepada peserta terkait dengan permasalahan di atas. Kemudian mencari solusi dari permasalahan yang diajukan oleh para peserta selama kegiatan berlangsung.

Metode Latihan

Memberikan Latihan-latihan dalam mengidentifikasi beberapa isu permasalahan pelayanan publik dalam kesehatan, ekonomi dan hukum islam serta bahan-bahan berupa simulasi dalam praktek pelayanan public yang baik dalam mewujudkan nagari maju.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat nagari dan perangkat nagari dari kegiatan edukasi sampai dengantahap evaluasi;

Tahap Persiapan

Tim pelaksana pengabdian melakukan pertemuan awal dengan perangkat nagari untuk melaksanakan pengabdian yang dilakukan di Nagari Lumbo. Hal yang di bahas antara lain terkait dengan pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi dan hukum islam. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang konsep kesehatan, ekonomi dan ilmu hukum mempengaruhi terwujudnya nagari maju dalam penerapan good governance. Sehingga masyarakat menyadari perlunya pemahaman pengetahuan tersebut untu meningkatkan kinerja apratur pemerintahan di sokong oleh pengetahuan masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Pengabdian Masyarakat pada Nagari Lumbo Kabupaten Pesisir dengan tema Mewujudkan Nagari Maju Melalui Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik Berbasis Kesehatan, Ekonomi dan Hukum Islam dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2022 pada jam 14.00 WIB yang dihadiri 22 orang peserta. Pemberian materi yang diberikan mampu menambah pengetahuan peserta pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan keseluruhan peserta kegiatan antusias dalam mengikuti Pengabdian berlangsung. Peserta mendengar dan menyimak materi yang diberikan oleh narasumber serta banyaknya pertanyaan yang muncul terkait dengan materi yang di sampaikan.

Peserta dalam kegiatan ini merupakan masyarakat nagari dan aparatur pemerintahan Nagari Lumbo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari pengabdian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat nagari mengenai pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi dan Hukum. Kepada perangkat nagari menambah wawasan dalam menerapkan good governance dalam pelayanan public di Nagari demi mewujudkan nagari yang maju.

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur nagari sangat di butuhkan untuk mewujudkan nagari maju melalui penerapan good governance dalam pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi dan hukum. Ada beberapa hal yang perlu di siapkan dalam pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi dan hukum islam. Pertama, Pelayanan publik aparatur pemerintahan Nagari Lumbo menjjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, waktu pelayanan yang efektif belum sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, Sebuah daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu berkembang secara terus – menerus. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan

daerah dalam menciptakan daya saing produktif.(Enita Puspitasari, 2021,p2). Ketiga, tercapainya pelayanan publik berbasis kesehatan menerapkan prinsip-prinsip transparansi melalui papan informasi kemudahan dalam memperoleh informasi, masih belum responsive dalam hal layanan pengaduan baik secara langsung maupun lewat telpon di samping itu juga sistem informasi pelayanan berbasis website sehingga mudah di akses oleh masyarakat dimana saja. Pemerintah menggunakan e-government adalah agar tercapainya good governance serta meningkatkan partisipasi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Termasuk untuk memenuhi pelayanan publik terutama pelayanan dasar yaitu kesehatan, pendidikan,dan kebutuhan pokok. Keempat, Mewujudkan pemerintahan yang baik bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena memerlukan proses. Good governance merupakan kebutuhan penting yang harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan, karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap good governance demi tercapainya tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan manajemen yang baik dalam mewujudkan pemerintahan. Ide menyelenggarakan good governance dapat terlaksana jika kembali pada nilai-nilai Islam. Keberadaan hukum Islam adalah penyelesaian atau sedikitnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah berbangsa dan bernegara. Hukum Islam mempunyai realitas sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Melalui peninjauan hukum Islam, dapat digali norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan hakikat dan prinsip good governance.

Selanjutnya evaluasi tentang materi yang sudah diberikan dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara mewujudkan nagari maju melalui penerapan good governance dalam pelayanan public berbasis kesehatan, ekonomi dan Hukum Islam.

Simpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat nagari dan perangkat nagari tentang penerapan good governance dalam pelayanan publik berbasis kesehatan, ekonomi dan Hukum Islam. kendala yang didapatkan selama Pengabdian yaitu jarak tempat pengabdian yang sangat jauh dan keadaan hujan yang sangat deras sehingga peserta yang hadir hanya 22 orang.

Kegiatan bermanfaat oleh masyarakat nagaari dan aparatur pemerintahan nagari. Pemahaman dan pengetahuan para peserta menjadi meningkat dengan adanya kegiatan ini. Hal ini disebabkan pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga harus dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya guna. menciptakan tata kelola pemerintahan yang teratur dan bersih dan memunculkan citra positif pemerintah. Dengan adanya kegiatan ini telah membuka mata aparatur pemerintahan nagari, bahwa apa yang telah mereka kerjakan selama ini dalam melayani masyarakat banyak yang keliru dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga ada masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan nagari.

Ucapan Terimakasih

Kepada segenap masyarakat nagari dan aparatur pemerintahan nagari ucapan terimakasih telah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah mendanai pengabdian dengan dana internal Universitas Mohammad Natsir Bukitting tahani 2022.

Referensi

- Angkat, K. M., Abdul, K., & Isnaini. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(15), 33–48.
- Assyahri, W., & Frinaldi, A. (2021). Work Culture of Digital Governance Impacting on Citizen Happiness Obtained by Department of Population and Civil Registration of Pariaman City. *Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia*, 580–593. *Magelang: European Alliance for Innovation*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311930>
- Assyahri, W., Lanin, D., & Saputra, B. (2021). The External Role of Public Managers in Improving the Quality of Community Services through Delivery to Mentawai Ethnic. *Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-*

- 22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, 570–579. Magelang: European Alliance for Innovation. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311929>
- Assyahri, W., & Vaguita, M. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 79–91. Retrieved from <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/91>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., Dermawan, R., Havifi, I., Sari, L. P., Safitri, C., ... Audia, N. (2022). Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam Perwujudan Pelayanan Prima di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten 50 Kota. *Communnity Development Journal*, 3(2), 616–620.
- Triyanto, D., Purnawan, H., & Saputra, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i1.1922>
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119–132. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>
- Witanti, W., & Abdillah, G. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Peningkatan Kinerja E-Government. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, 221–228.